

Civil Society dan Abrahamic Religions

Bernard Adeney-Risakotta, Ph.D. [⊗]

Abstract:

This article examines how the discourse on civil society provided an alternative social vision for Indonesia, especially during the period before and after the fall of Soeharto. The article considers the similarities and differences between the concepts of civil society, *madani* (civilized) society, and Pancasila, the national ideology. Civil society, in the end, is a basic prerequisite for building a society that is faithful to Pancasila. Civil society can be defined in relation to the three main meanings of the word “civil” in English. The first is a minimalist definition of the word civilized. For people to act civil (or civilized) towards each other, they must be polite and respect each others differences. Secondly, a civil society is one in which the people are free to form non-governmental, civil organizations to reach their own goals without intervention by the government. Thirdly, a civil society is a society that is not dominated by the military. A civilian is a non military person. Similarly, a civil society is a non-militarized society in which, within the boundaries of the law, people are free from violent coercion. By building a civil society, Indonesia can move towards fulfilling the noble vision of Pancasila.

Kata-kata kunci: civil society, masyarakat modern, etika sosial, Abrahamic religions

I. Civil Society¹: Suatu Wacana Alternatif terhadap Pancasila dalam Upaya Mencari Tahu Identitas Indonesia

Indonesia masih menghadapi tantangan untuk menciptakan makna baru bagi identitas bangsa negara Indonesia. Sejak berakhirnya Orde Baru, banyak pertanyaan muncul tentang bentuk bangsa negara Indonesia. Menjelang pemilu 2009, masyarakat masih bertanya, apa itu “Indonesia?” Wacana tentang civil society dan/atau masyarakat madani pernah merupakan salah satu upaya untuk mengerti bagaimana kita bisa menjadi bangsa negara (nation-state), yang baik. Apa, atau siapa Indonesia yang dicita-citakan?

Indonesia sudah pernah memiliki definisi yang cukup hebat tentang masyarakat yang baik atau *civil* atau “madani”, yaitu Pancasila. Pancasila muncul sebagai hasil dari musyawarah mufakat yang menyatakan semacam visi untuk civil society. Visi ini bisa dilihat dari tiga aspek. 1. Pancasila dimengerti sebagai persetujuan (mufakat), tentang apa yang menjadi landasan bangsa negara yang paling mendasar. “Yang paling dasar” bisa diterjemahkan sebagai yang paling minimal. Pancasila merupakan visi bangsa negara yang

bisa disetujui oleh semua unsur masyarakat Indonesia, walaupun bukan visi paling sempurna kelompok-kelompok tertentu. 2. Pancasila diciptakan sebagai aturan main, yaitu sila-sila yang mengatur proses membangun bangsa negara yang diinginkan. Ini berarti bahwa struktur negara, hukum dan kebijaksanaan pemerintah adalah seyogianya sesuai dengan Pancasila. Proses membangun negara yang jelas bertentangan dengan Pancasila seharusnya ditolak. 3. Pancasila juga dimengerti sebagai tujuan ideal bangsa negara Indonesia. Indonesia bertekad menjadi bangsa negara yang pancasilais walaupun tujuan ideal itu belum terwujud.

Wacana (*discourse*) tentang civil society yang cukup hangat di Indonesia selama periode sebelum dan sejak Presiden Soeharto dilengserkan, merupakan tanda dari krisis Pancasila sebagai ideologi negara. Kalau sudah ada masyarakat pancasilais, mengapa perlu diskusi tentang civil society? Salah satu alasan adalah karena hak penafsiran Pancasila sebelumnya menjadi monopoli negara (Orde Baru), yang tidak boleh diperdebatkan secara terbuka. Pancasila sudah disakralkan dan dijadikan ideologi politik yang tidak lagi dimiliki oleh masyarakat tetapi dipakai sebagai alat kekuasaan untuk memaksakan kehendak elit politik. Pancasila tidak boleh ditafsirkan oleh siapapun kecuali negara. Dalam keadaan seperti itu, civil society/masyarakat madani menjadi wacana menarik oleh karena konsepnya bukan sakral, tidak tabu dan bukan milik negara.

Civil society justru menawarkan semacam tempat wacana tentang makna bangsa negara Indonesia yang di luar kekuasaan politik. Civil society menjadi “alternative discourse” yang secara tidak langsung menentang monopoli negara tentang makna bangsa negara Indonesia. Minat terhadap civil society juga menjadi hangat oleh karena wibawa Pancasila makin berkurang dalam kalangan cendekiawan Indonesia selama dekade sembilanpuluhan dan awal abad 21. Pancasila terlalu diperalat oleh kekuasaan sehingga masyarakat merasa jenuh dengan “cerita” Pancasila yang sudah menjadi mantra tanpa makna. Apakah civil society atau masyarakat madani mampu dijadikan ideologi baru yang dapat menjelaskan siapa kita? Pada musim pemilu wacana tentang Pancasila dan nasionalisme Indonesia menjadi populer lagi dan civil society jarang dibahas. Apakah ini berarti civil society dan/atau masyarakat madani tidak relevan lagi?

© Bernard Adeney Risakotta, Ph.D. adalah Dosen pada Fakultas Teologi Universitas Kristen Duta Wacana, Yogyakarta dan Direktur Indonesian Consortium for Religious Studies (ICRS) Yogyakarta.

II. Perbedaan di antara Civil Society dan Masyarakat Madani

Civil society merupakan semacam konstruksi sosial simbolis yang tidak pernah terwujud secara riil dalam masyarakat apapun. Tidak ada kenyataan yang bisa disebut civil society di dunia nyata. Hal yang sama bisa dikatakan bahwa simbol masyarakat madani adalah suatu simbol tentang salah satu visi dari suatu masyarakat. Memang ada saudara-saudara Muslim yang menegaskan bahwa sudah pernah ada masyarakat madani, yaitu masyarakat Madinah. Namun, Madinah, ratusan tahun yang lalu bukan sama dengan Indonesia abad 21. Apabila masyarakat Indonesia yang madani diusahakan, akan menjadi perbuatan yang kurang lebih baru di dunia ini dan tidak pernah sempurna. Paling-paling kita bisa menyatakan bahwa masyarakat tertentu lebih atau kurang civil atau madani.

Masyarakat bisa disebut lebih atau kurang civil atau madani sejauh ia menampakkan sifat ciriannya. Dalam hal ini, sebaiknya ia diperbedakan di antara: 1. civil society sebagai tujuan ideal dan 2. civil society sebagai proses. Berbeda dari Pancasila, makna civil society belum ada mufakat (*concensus*). Civil society sebagai proses termasuk wacana tentang bagaimana membangun infrastruktur sosial, budaya, ekonomi, agama dan politik yang lebih atau kurang mendukung ciri-ciri civil society yang diharapkan. Tetapi cita-cita civil society atau masyarakat madani yang bisa diterima oleh keseluruhan bangsa-negara Indonesia belum jelas. Bahkan di tengah krisis disintegrasi harus dipertanyakan, bagaimana membangun visi bangsa negara Indonesia yang merupakan hasil mufakat dari seluruh masyarakat?

Di Indonesia sudah ada banyak tulisan tentang perbedaan di antara konsep civil society dan konsep masyarakat madani. Kedua konsep ini merupakan tipe ideal (*ideal type*), yang sangat fleksibel dan bisa dilihat sebagai rangkaian kesatuan di antara dua ekstrim. Di satu ekstrim, *civil society* dikatakan konsep Barat yang berdasarkan pola masyarakat yang liberal, individualis, kapitalis dan sangat bebas.² Di sisi yang lain, masyarakat madani dilihat sebagai konsep Islam/Arab yang berdasarkan pola masyarakat di Madinah yang sesuai dengan syaria Islam.

Jarak yang cukup lebar di antara kedua tipe ideal ini bisa dijelaskan dengan pandangan masing-masing sesuai dengan prinsip ketatanegaraan yang melatarbelakanginya. Dalam teori liberal, civil society sering dipandang sebagai tempat yang bebas dari campur tangan negara. Civil society diwujudkan melalui lembaga-lembaga dan institusi-institusi ("intermediate institutions"), yang tidak dikendalikan oleh negara tetapi justru mengeritik dan mengontrol negara. Asumsi di belakang kebebasan civil society adalah pluralisme. Perbedaan agama, budaya dan perilaku (*practices*), harus dihormati supaya kelompok-

kelompok yang mempunyai identitas-identitas yang berbeda dibiarkan (atau dilindungi), supaya mereka bisa mewujudkan cita-cita sendiri yang tidak tentu sama dengan kelompok lain. Pemerintah harus netral terhadap perbedaan tersebut dan hanya melindungi hak-hak setiap kelompok sejauh mereka tidak mengganggu atau melanggar hak-hak kelompok lain.

Sebaliknya, "masyarakat madani" adalah masyarakat yang dikendalikan oleh negara melalui hukum yang benar. Masyarakat madani adalah masyarakat yang taat kepada hukum yang jujur dan adil. Misalnya, Nurcholish Madjid menulis, "...pemerintah selaku wasit, pembuat aturan dan penertib masyarakat madani...negara dituntut untuk mampu menangani *civil society*...ia tidak dapat dibina tanpa kekuasaan negara..."³ Visi masyarakat madani seperti ini, tentu saja, menghendaki pemerintahan yang bijaksana dan sungguh baik. Pluralisme dan perbedaan juga akan dilindungi menurut pandangan seperti ini. Tetapi perbedaan kelompok (agama, budaya, praktek), dibatasi sesuai dengan visi sosial yang dicita-citakan oleh pemerintah.

Dalam esei ini saya berkeinginan mencari tahu sejauh mana kedua tipe ini bisa disatukan dan sejauh mana mereka cocok atau kurang cocok untuk Indonesia. Titik tolak saya dari konsep *civil society* dan bukan dari masyarakat madani oleh karena wacana tentang *civil society* adalah sumber konsep masyarakat madani. Namun tidak tertutup kemungkinan bahwa masyarakat madani adalah konsep yang lebih cocok untuk Indonesia, atau untuk sebagian dari masyarakat Indonesia, daripada konsep *civil society*. Menurut pandangan saya, kedua ekstrim (yang liberal Barat dan yang Muslim Arab), kurang cocok di Indonesia dan kita harus mencari pengertian *civil society* yang sesuai dengan sejarah dan konteks Indonesia. Metode analisa dalam makalah ini bukan diskusi abstrak tentang hal yang ideal saja, tetapi kajian terhadap krisis bangsa negara Indonesia dalam hubungan dengan visi untuk menciptakan masyarakat yang lebih baik.

III. Makna Civil Society

Sudah cukup jelas bahwa tidak ada satu kata dalam bahasa Indonesia yang cocok untuk menerjemahkan kata bahasa Inggris "civil." "Civil" dalam bahasa Inggris mempunyai banyak makna yang berbeda. Bahkan, makna-makna tersebut mempunyai banyak nuansa lain. Oleh karena itu, konsepnya sangat kaya dan sekaligus agak kabur. Mungkin sudah ada ratusan definisi *civil society*, tetapi mengapa makin banyak definisi, makin kabur artinya? Kesulitan menerjemahkan *civil society* ke dalam bahasa Indonesia oleh karena terjemahan apapun tidak bisa merangkul semua makna. Kalau *civil society* kurang dipahami dalam bahasa Indonesia, jangan kuatir, maknanya kurang jelas dalam bahasa Inggris juga!

Namun ada tiga makna dari kata *civil* (dalam bahasa Inggris), yang paling cocok dengan istilah *civil society*. 1. *Civil* bisa berarti “civilized” atau beradab. *Civil society* berarti masyarakat beradab atau madani. Memang makna beradab atau madani juga kurang jelas. Tetapi dalam bahasa Inggris, paling sedikit, *civil* berarti hubungan di antara masyarakat yang sopan, halus dan toleran terhadap satu sama lain. Makna *civil* ini sangat minimal, bukan maksimal. Artinya, *civil* tidak bermaksud mencintai, gotong royong, bersaudara, kerja bahu-membahu atau bahkan simpatik. *Civil* hanya berarti sopan, toleran, tidak kasar. Orang yang *civil* adalah orang yang sopan dan toleran terhadap orang yang berbeda. Titik. Belum tentu orang *civil* adalah orang baik hati. Dalam konteks Indonesia, kalau orang saling menyerang, membunuh, membenci dan meremehkan (secara halus atau kasar), jelas itu bukan perilaku “*civil*.” Masyarakat di mana kekerasan sering terjadi kurang *civil*, malah bisa dikatakan sebaliknya bahwa itu “*uncivil society*” (masyarakat biadab).⁴

2. Makna *civil* kedua berarti seorang, kelompok, lembaga atau instansi yang “bukan negara” (*state*). Artinya, masyarakat yang tidak sebagian dari pemerintahan. Memang arti ini sangat luas dan termasuk semua orang yang bukan pegawai negeri atau tentara. Tetapi yang biasanya ditekankan adalah lembaga dan institusi yang diciptakan oleh masyarakat sendiri, tanpa campur tangan pemerintah. Makna *civil* kedua ini dijelaskan melalui konsep perpisahan kekuasaan (*separation of powers*), yaitu bahwa pemerintah tidak boleh menguasai atau mengendalikan perkumpulan masyarakat kecuali ketika kebaikan umum (*common good*) terancam. Lembaga masyarakat seperti LSM atau lembaga pendidikan, atau lembaga agama seharusnya bebas untuk mengatur diri sendiri, selama mereka tidak melanggar hukum atau mengganggu kelompok lain. Tidak kebetulan saja bahwa LSM-LSM, tokoh-tokoh universitas, wartawan-wartawan dan pemimpin-pemimpin agama menjadi pengeritik paling efektif terhadap Orde Baru. Mereka berada dalam lembaga-lembaga *civil society* yang sulit dikuasai oleh pemerintah.

Pemerintah mempunyai tugas yang terbatas, yang diatur oleh konstitusi dan hukum. Masyarakat yang *civil* mempunyai hak otonomi yang terpisah dari pemerintah dalam banyak bidang. Ini berarti masyarakat *civil* harus mengendalikan dan mengatur diri sendiri. Tugas negara adalah melindungi masyarakat *civil* supaya mereka bisa mengatur hidup sendiri. Posisi pemerintah sebagai wasit diperlukan apabila masyarakat *civil* menjadi kurang *civil* dan melanggar hukum. Tetapi keadaan seperti itu merupakan kegagalan *civil society* yang tidak diinginkan. Dalam kasus HKBP beberapa tahun yang lalu, negara terlibat dan mendikte urusan salah satu gereja yang paling besar di Indonesia dan berpihak kepada salah satu kubu yang sedang bertentangan. Peristiwa tragis itu merupakan contoh pahit, baik tentang

kelemahan lembaga agama itu yang tidak bisa menghindari intervensi tersebut, maupun pelanggaran Orde Baru terhadap civil society, dalam hal ini lembaga agama, yang seharusnya bebas dari campur tangan pemerintah.

3. Makna civil ketiga berarti “bukan militer.” Seorang “civilian” adalah seorang yang bukan militer.⁵ Dari makna ini bisa disimpulkan bahwa masyarakat civil (sipil), adalah masyarakat yang terpisah dari militer dan tidak termasuk militer. Kecuali dalam situasi darurat, militer tidak boleh campur tangan dengan kehidupan masyarakat sipil. Tentu saja, masih harus ada polisi yang mampu menghindari kekerasan dan menangkap penjahat. Tetapi polisi bukan militer. Dalam hal ini, tidak hanya ada civil society tetapi juga civil government (pemerintah sipil). Pemerintah sipil tidak dikuasai oleh militer dan tidak boleh memerintah atau mengendalikan masyarakat melalui militer. Militer seharusnya merupakan alat keseluruhan masyarakat, melalui perwakilan dalam pemerintah, untuk melindungi masyarakat dari ancaman luar negeri. Yang melindungi masyarakat dari penjahat dalam negara seharusnya polisi, bukan militer.

Mengapa demikian? Ada empat alasan pokok. Pertama, oleh karena masyarakat yang civil tidak harus diatur dengan sistem kekerasan yang adalah ciri khas militer. Cukup penjahat dalam civil society dilawan dengan tingkat kekerasan yang sudah dimiliki oleh polisi. Kedua, polisi diatur oleh hukum dan peraturan sipil yang sangat memperhatikan hak asasi manusia, padahal militer diatur oleh hukum militer yang lebih terfokus kepada keharusan menang dalam medan perang. Polisi ditugaskan untuk melayani dan melindungi masyarakat dengan tingkat kekerasan yang paling minimal, padahal militer dilatih untuk menang dalam perang dengan pendekatan kekerasan maksimal. Banyak masalah di Indonesia yang pernah menimbulkan kekerasan massal, seperti di Timor Timur, Aceh, Papua, Poso dan Ambon dipengaruhi oleh kebiasaan Orde Baru memakai militer dan bukan polisi, untuk mengendalikan masyarakat.⁶

Ketiga, kalau militer terlibat dalam semua fungsi kemasyarakatan, seperti bisnis, birokrasi, gerakan sosial, komunikasi (sipil) dan bahkan pemerintahan, mereka sering kali tergoda untuk melindungi kepentingan elit melalui kekerasan (atau ancaman kekerasan). Mereka dijadikan alat penguasa untuk memaksa kehendaknya kepada masyarakat. Misalnya, pada tahun 1993 di Maluku Utara, petani-petani yang tidak mau menjual lahan mereka kepada konglomerat ditakuti ataupun ditangkap oleh militer. Hal seperti itu sudah biasa dalam pemerintahan Orde Baru. Keempat, militer yang bermain dalam semua bidang masyarakat hampir pasti akan mempunyai kepentingan sendiri, termasuk kepentingan ekonomis. Sejauh mana mereka berkepentingan, maka sistem negosiasi dengan masyarakat

tidak fair. Orang yang memegang senjata (dan teman-temannya yang bersenjata) tidak dengan mudah ditolak. Satu contoh kecil saja terjadi di mana seorang tentara tersinggung oleh karena satpam di pasar menuntut suara tapenya dkecilkan. Akibatnya, dia bersama dengan teman-temannya merusak banyak warung di pasar tersebut. Bagaimana pemilik warung makan bisa berani melawan tentara?

Sebagai kesimpulan dari ketiga makna civil society yang dijelaskan atas ini, kita bisa mendefinisikan civil society sebagai *masyarakat yang sopan dan toleran terhadap satu sama lain, yang mampu mengatur diri sendiri melalui pelbagai lembaga, tanpa campur tangan pemerintah, dan yang bebas dari paksaan, ancaman dan kekerasan militer*. Definisi seperti ini bersifat sekaligus ideal dan minimal. Ideal dalam arti bahwa belum pernah masyarakat seperti ini terwujud secara sempurna dan masyarakat Indonesia masih agak jauh dari gambaran definisi ini. Tetapi idenya minimal dalam arti, masyarakat seperti ini tidak tentu masyarakat baik, adil atau sejahtera.

IV. Dekonstruksi Konsep Civil Society dan Masyarakat Madani

Konsep civil society ini sangat tipis tetapi harapan yang dikaitkan dengan konsep ini sangat besar. Seperti yang dikatakan Robert Hefner, “Rarely has so heavy an analytic cargo been strapped on the back of so slender a conceptual beast.”⁷ Maksudnya, jarang ada konsep yang begitu kecil dan minimal yang diharapkan bisa dipakai untuk menganalisa dan memecahkan begitu banyak masalah sosial masyarakat. Hefner bercerita seolah-olah konsep civil society seperti hewan kurus yang harus memikul beban berat, yaitu tugas membangun masyarakat yang baik!

Dari tinjauan definisi di atas ini, sulit dimengerti mengapa begitu banyak harapan dan minat terkait dengan konsep civil society. Boleh dikatakan bahwa visi masyarakat dalam Pancasila jauh lebih sempurna dibandingkan civil society. Pancasila jauh lebih lengkap dengan visi keadilan sosial, kemanusiaan, demokrasi, kesatuan dan persatuan, ketuhanan, gotong royong, kesejahteraan dan banyak hal lain. Civil society hanya menawarkan kesopanan, kebebasan dari campur tangan pemerintah (dalam hal tertentu), dan kehidupan tanpa paksaan militer. Civil society menurut definisi di atas tidak menjamin keadilan sosial, hak asasi manusia, pemberantasan kemiskinan, hormat kepada agama, insitusi demokratis, kesetaraan sosial, kedaulatan rakyat atau banyak hal lain yang diinginkan oleh kita semua. Mungkin oleh sebab itu disebut “hewan kurus” oleh Hefner!

Seandainya saya bisa memilih di antara kehidupan dalam masyarakat pancasilais atau kehidupan dalam civil society, jelas saya memilih masyarakat pancasilais. Tentu saja,

maksudnya bukan masyarakat pancasilais seperti Orde Baru, yang sering berbohong tentang kenyataan sosial. Sebaliknya, seandainya saya harus memilih di antara masyarakat di mana gereja dan mesjid dibakar, orang lemah diusir, tentara main hakim dan kekerasan sering dipakai untuk memaksa kehendak kelompok tertentu, pasti saya lebih memilih kehidupan dalam civil society. Paling sedikit aman, kan? Namun, yang diharapkan oleh kita semua di Indonesia bukan civil society saja, tetapi lebih dari itu, masyarakat yang lebih mirip apa yang diceritakan oleh Sukarno dan Hatta dan dimufakati dalam bentuk Pancasila.

Kalau kita mau mencari konsep negara kita yang lebih baik daripada Pancasila, mengapa kita tertarik kepada civil society? Bukankah civil society adalah konsep Barat yang sudah gagal membangun masyarakat yang adil dan harmonis di sana? Seandainya Pancasila gagal menciptakan cita-cita masyarakat yang diharapkan, ada dua kemungkinan sebagai tanggapan atau jawaban. Dari satu pandangan kita bisa mencoba menyempurnakan Pancasila dengan penafsiran baru, revisi terhadap hal-hal yang kurang jelas, menambah alat penerapan yang lebih detail dan/atau peraturan baru yang lebih terinci dan lengkap. Dari pandangan lain, kita bisa menyederhanakan Pancasila atau bahkan menyimpan Pancasila saat ini, sebagai mimpi bagus yang terlalu lama menutup mata kita terhadap jarak yang begitu jauh di antara ideologi negara dan kenyataan yang pahit. Mungkin sesudah beberapa waktu kemuliaan visi Pancasila bisa berguna lagi, tetapi sekarang kami terlalu dekat dengan penyalahgunaan ideologi tersebut.

Saya menduga (walaupun belum yakin), bahwa konsep masyarakat madani merupakan tanggapan pertama yang mau menyempurnakan Pancasila. Sedangkan konsep civil society lebih dekat dengan tanggapan kedua yang mau mencari alat konseptual lain yang lebih sederhana. Pandangan tentang masyarakat madani lebih terfokus kepada tujuan madani, yaitu masyarakat beradab, dan lebih percaya kepada pemerintah sebagai sarana yang harus dipakai untuk menciptakan masyarakat madani. Sebaliknya, konsep civil society lebih berfokus terhadap proses menciptakan masyarakat sipil melalui kebebasan dari kekuasaan negara dan militer, serta otonomi lokal. Civil society lebih curiga terhadap peran pemerintah dalam masyarakat.

Banyak orang yang bukan Muslim takut pada konsep masyarakat madani oleh karena hubungannya dengan Madinah dan negara Islam. Mereka kuatir bahwa masyarakat madani yang direncanakan adalah masyarakat yang taat kepada hukum Islam. Kalau peran negara sebagai sarana menciptakan masyarakat madani ditekankan, ada kekhawatiran lagi bahwa pemerintahan besar dan kuat (*big government*), akan dihasilkan. Seandainya hukum dipakai sebagai senjata untuk memaksa rakyat menjadi baik (madani), sesuai dengan ajaran Al

Qur'an, bagaimana dengan kalangan atau agama yang tidak setuju dengan definisi madani yang dianut pemerintah? Mereka tidak mau terpaksa taat terhadap hukum Islam.

Kadang-kadang saudara-saudara Muslim berusaha menenangkan umat Kristen dengan janji bahwa dalam negara Islam dan/atau masyarakat madani, hak-hak umat beragama minoritas yang non-Muslim selalu dilindungi. Malah katanya, lebih dekat pusat Islam, lebih toleran dan lebih harmonis hubungan di antara agama.⁸ Sayangnya, pernyataan seperti itu sama sekali tidak menenangkan umat Kristen tetapi malah sebaliknya. Mereka tidak mau dipisahkan atau diistimewakan sebagai minoritas khusus yang tidak setara dengan warga negara yang beragama Islam. Umat non-Muslim tidak mau disingkirkan dari partisipasi penuh dalam negara mereka sendiri. Bukan perlindungan, tetapi hak-hak yang sama dengan semua warga negara Indonesia yang diharapkan.

Dari pendekatan ini, dalam kewarganegaraan seharusnya tidak ada minoritas dan mayoritas. Setiap warga negara Indonesia seharusnya sama statusnya di depan hukum, tanpa memandang agama, ras, etnisitas, suku, partai politik, ideologi atau golongan. Seandainya negara menjadi alat untuk mewujudkan, melalui hukum, citra-citra satu agama saja, disintegrasi bangsa negara Indonesia hampir pasti menjadi kenyataan. Cukup banyak orang Indonesia non-Muslim yang secara tegas menolak kehidupan sebagai minoritas dalam negara Islam. Ternyata sebagian besar orang Indonesia yang beragama Islam juga kurang tenang dengan ide negara Islam oleh karena mereka tidak mau terpaksa ikut penafsiran tertentu dari syaria Islam. Kalau konsep masyarakat madani mau diterima sebagai yang ideal bagi keseluruhan bangsa Indonesia, konsepnya harus dipisahkan dari visi satu agama saja dan diisi dengan visi yang bisa diterima oleh seluruh masyarakat Indonesia.

Di bandingkan dengan pendekatan masyarakat madani, konsep civil society tidak terlalu percaya bahwa pemerintah pusat bisa menciptakan masyarakat yang baik. Rakyat sendiri yang harus menciptakan masyarakat yang baik. Paling-paling pemerintah bisa menjaga hak-hak setiap kelompok (dan khususnya kelompok yang paling lemah), dari penindasan atau pelanggaran terhadap kemerdekaan mereka. Sekurang-kurangnya, masyarakat harus dilindungi oleh hukum dari penindasan penguasa-penguasa, termasuk elit politik, elit ekonomi dan elit militer.

Dalam pandangan liberal Barat yang paling penting adalah bahwa hak-hak setiap individu dijaga dan kebebasan maksimal terjamin. Di Amerika Serikat, setiap individu dianggap sakral. Sejak permulaan Amerika Serikat dibayangi dengan trauma pendatang pertama yang kabur karena penindasan terhadap agama-agama mereka. Oleh karena itu, hati nurani setiap warga negara tidak boleh diatur oleh pemerintah. Individu-individu boleh

percaya dan melakukan apa saja selama ia tidak mengganggu orang lain; sampai sekte-sekte kepercayaan yang sangat kecil dan aneh dilindungi hak-haknya. Negara harus seratus persen netral terhadap visi sosial yang dianut oleh setiap individu atau kelompok.

Menurut Ronald Dworkin, dalam masyarakat liberal, tidak ada satu visi sosial tentang apa yang baik untuk masyarakat, atau bagaimana makna hidup manusia bersama.⁹ Pemerintah tidak boleh memaksa satu pandangan. Yang disetujui bersama oleh masyarakat liberal ini, hanya bahwa setiap orang harus dihormati secara setara. Pandangan ini sangat dipengaruhi oleh filsafat Kant dan dibela secara mendalam oleh John Rawls.¹⁰

Tidak semua pemikir liberal barat setuju dengan pandangan yang ekstrim ini. Filosof Liberal seperti Charles Taylor dan Michael Walzer menawarkan semacam “communitarian Liberalism” yang mengizinkan pemerintah mendukung tujuan-tujuan dan nilai-nilai kelompok tertentu, khususnya mereka yang kurang kuat atau tertindas.¹¹ Namun, cukup jelas bahwa negara liberal tidak boleh memaksakan satu ideologi negara, seperti Pancasila. Pemerintah liberal yang ideal hanya memelihara proses hubungan masyarakat yang fair dan hak-hak manusia yang setara. Dari analisa ini, cukup jelas mengapa konsep civil society yang terkait dengan liberalisme begitu kurus.

Harus diakui bahwa civil society yang terkait dengan liberalisme ekstrim ternyata tidak terlaksanakan dalam kebanyakan negara barat. Secara tersembunyi atau terbuka mereka juga membela nilai-nilai lebih luas daripada hak-hak individu dan kebebasan setiap kelompok. Namun, dari pandangan saya, civil society yang terlalu kurus kurang memuaskan. Kita di Indonesia memerlukan visi untuk bangsa negara yang lebih *substantive* (berisi), daripada negara yang melindungi hak-hak setiap orang dan kelompok dalam masyarakat. Dalam kevakuman nilai-nilai yang cenderung hanya memakai bahasa hak-hak, seperti di Amerika Serikat, kekuatan ekonomi kapitalis sering menguasai semua hubungan masyarakat.

Kalau pemerintah tidak berpihak terhadap nilai sosial tertentu, yang paling mampu mengendalikan masyarakat bukan individu-individu, agama-agama atau institusi-institusi masyarakat (seperti LSM), tetapi konglomerat-konglomerat besar yang membentuk masyarakat sesuai dengan kepentingan mereka sendiri. Dana yang sangat besar menciptakan pandangan terhadap makna hidup manusia yang sulit ditandingi oleh apapun atau siapapun. Sudah di Indonesia kita melihat dampak globalisasi yang dikuasai oleh bisnis internasional dan sedang membentuk pemuda Indonesia melalui teknologi informasi masal. Hasilnya tidak menyenangkan.

Sebelum saya pindah ke Indonesia pada tahun 1991, saya tinggal di daerah San Francisco Bay di California. Walaupun itu kota besar dengan jutaan penduduk, surat kabar-

surat kabar yang tersedia jauh di bawah kualitas surat kabar yang bisa dibeli di Yogyakarta, walaupun Yogya kota kecil. Apalagi pers di Amerika bebas dari sensor pada hal sebelum reformasi, surat kabar Indonesia sangat terbatas dalam hal yang boleh ditulis secara terbuka. Namun wacana dalam koran Indonesia jauh lebih dalam daripada cerita-cerita dalam koran San Francisco, Oakland dan Berkeley. Koran-koran di sana didominasi oleh iklan-iklan dan cerita sensasional tentang seks dan kekerasan. Mengapa begitu? Alasannya sederhana. Untuk tetap bertahan, koran-koran di sana harus menjual sebanyak-banyak eksemplarnya setiap hari. Mereka harus tunduk kepada kepentingan ekonomi dan selera konsumen yang sudah dibentuk oleh kekuasaan ekonomi. Civil society yang kurus itu membiarkan kepentingan ekonomi global (yang gemuk), menguasai nilai-nilai masyarakat.

Sudah cukup jelas bahwa saya kurang puas, baik dengan konsep masyarakat madani (sejauh saya memahaminya), maupun dengan civil society liberal ekstrim. Namun, dalam konteks membangun Indonesia sesudah periode transisi yang panjang, saya berharap semacam sintesis di antara kedua pandangan ini bisa dibentuk, yang mampu membantu kita menghadapi tantangan milenium baru. Sintesis tersebut tidak perlu bertentangan dengan Pancasila.

V. Civil Society dalam Konteks Krisis Indonesia

Salah satu kekeliruan menurut saya, adalah asumsi bahwa civil society di Indonesia sangat lemah, selama 32 tahun Orde Baru berkuasa. Lebih lanjut, banyak orang berasumsi bahwa dengan reformasi, secara otomatis, civil society menjadi lebih kuat. Untuk memeriksa asumsi ini, sebaiknya kita memperbedakan di antara civil society dan *civil government* (pemerintahan sipil). Civil society adalah masyarakat yang mampu mengendalikan diri, hidup secara harmonis, di mana pluralisme agama dan budaya dihormati, dan di mana mereka melaksanakan hak-hak mereka untuk membangun masyarakat sesuai dengan niat masing-masing. Pemerintahan sipil adalah pemerintah yang tunduk kepada kedaulatan rakyat secara demokratis, taat kepada hukum sipil, tidak dikuasai oleh militer dan tidak memakai kekerasan atau paksaan di luar hukum terhadap masyarakat sendiri.

Kalau perbedaan di antara pemerintah sipil dan civil society diterima, tidak begitu aneh kalau dikatakan bahwa civil society lumayan kuat sebelum Soeharto lengser, walaupun pemerintahan sipil sangat lemah. Sebelum reformasi, kemampuan masyarakat Indonesia hidup bersama secara damai di tengah pluralisme agama, budaya, suku, etnis dan ideologi luar biasa. Memang harus diakui bahwa ketegangan diantara kelompok sering

disembunyikan. Tetapi masih lumayan mengagumkan. Apakah Pancasila sebenarnya lebih berhasil sebagai ideologi daripada diduga?

Civil society Indonesia juga subur dalam kemandirian banyak LSM, yayasan agama dan institusi lain yang cukup independen dari pemerintah. Walaupun pemerintah yang kurang *civil* sering kali mencoba mengendalikan civil society dan terus menerus melanggar hukum sendiri (apalagi prinsip-prinsip Pancasila), masyarakat tidak pernah tunduk saja. Bahkan di tingkat desa, petani-petani pun tidak selalu percaya saja kepada bohong-bohong aparat atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah.¹² Walaupun pers disensor dan diteror, kebenaran selalu bisa ditemui oleh siapapun yang mampu membaca di antara garis-garis. Ketika majalah ditutup, penulis-penulis yang sama muncul dalam publikasi lain yang sering kali lebih berani lagi (seperti D&R).

Civil society khususnya nampak dalam universitas-universitas di mana banyak dosen dan mahasiswa berani berpikir sendiri dan tidak takut mengucapkan hal yang sebenarnya dilarang oleh pemerintah yang kurang civil (kurang ajar). Kesehatan civil society menjadi sangat terang ketika hampir keseluruhan masyarakat tidak menerima hasil dari “pesta demokrasi” 1997 dan memaksa President Soeharto mundur. Pada waktu itu harus diakui bahwa gejala-gejala “uncivil society” (masyarakat kurang ajar), juga mulai nampak. Kekerasan terhadap suku Tionghua, kebakaran, penjarahan, kerusuhan dan pembunuhan misterius mengagetkan masyarakat. Tetapi mahasiswa menahan diri dan masih kurang-lebih “civil” dalam protes mereka. Saya tidak akan pernah melupakan demonstrasi di Yogya di mana 500.000 orang berjalan tanpa kerusuhan apapun. Pada hari itu tidak ada tentara atau polisi yang nampak, tetapi masyarakat berjalan damai dan memperlihatkan begitu kuat civil society Indonesia.

Sesudah Soeharto lengser, gejala “uncivil society” menular di seluruh Indonesia. Ini merupakan ironi besar oleh karena sedang civil society memburuk, pemerintahan yang sipil bertumbuh luar biasa. Sekalipun di bahwa pemerintahan Habibie, banyak hak individu, kelompok, agama, pers, aktivis, partai politik dan lain-lain dijamin secara hukum. Tetapi ketika pemerintah direformasikan sehingga Gus Dur dan Megawati bisa menjadi pemimpin negara, masyarakat seperti tidak mau civil lagi. Sayangnya, gejala “uncivil” dalam masyarakat Indonesia pada waktu itu, sangat terkait dengan agama. Sekarang ini Indonesia jauh lebih stabil baik secara politik maupun ekonomik dan gejala civil society juga lebih nampak. Mungkin saja sukses dari civil society terkait dengan keamanan, kesejahteraan dan stabilitas umum.

VI. Ancaman kepada Civil Society dan Tanggapan dari Agama Kristen

Dua dimensi dari ancaman kepada “kecivilsocietyan” agama Kristen di Indonesia adalah ancaman dari luar dan ancaman dari dalam. Ancaman dari luar merupakan hal-hal dan faktor-faktor di luar agama sendiri yang menghambat keberadaan agama Kristen sebagai unsur penting dalam civil society. Ancaman dari dalam merupakan kelemahan-kelemahan dalam agama Kristen sendiri yang menghambat civil society. Tantangan kepada Gereja selalu datang, baik dari luar maupun dari dalam diri sendiri. Kedua dimensi tersebut sering kali terkait erat satu sama lain.

1. Ancaman “Zaman Edan”

Cukup ironis seandainya civil society lebih kuat pada masa orba daripada pada masa reformasi. Tetapi dari pandangan tertentu begitulah kenyataannya. Di bawa tangan besi Presiden Soeharto, masyarakat terpaksa sopan dan halus, yaitu civil dan beradab. Tetapi kesabaran masyarakat habis dan Soeharto terpaksa lengsor. Masyarakat sudah menjadi kurang ajar kepada Presiden oleh karena Presiden terlalu lama berbohong dan merampok masyarakat. Dalam iklim demokrasi dan pembebasan perilaku sopan dan halus seperti tidak dihargai lagi. Setiap kelompok secara terang-terangan berjuang untuk kepentingan sendiri, kalau perlu, dengan paksa. Masyarakat menjadi makin “uncivil” (biadab).

Demokrasi dan pembebasan tidak sama dengan civil society. Demokrasi dan pembebasan sulit bertahan kalau tidak ada civil society dua dan tiga, yaitu tempat sosial (“social space”), yang bebas dari campur tangan pemerintah dan militer. Tetapi masyarakat yang demokratis dan bebas bisa menjadi sangat “uncivil” (biadab), padahal tujuan demokrasi dan pembebasan adalah menciptakan masyarakat beradab. Saya sangat terkesan dengan komentar almarhum Romo Y. B. Mangunwijaya, Pr. pada waktu beliau memberi tanggapan terhadap sebuah video yang memperlihatkan kerusuhan-kerusuhan Mei, 1998. Romo Mangun menyatakan bahwa video tersebut sangat menyedihkannya oleh karena menunjukkan kebiadaban masyarakat Indonesia.

Kesan saya bahwa makin meningkat “general lawlessness” di mana pada umumnya masyarakat tidak menghormati pemerintahan sebab terlalu lama pemerintah tidak menghormati rakyat. “Lawlessness” berarti hukum tidak berfungsi dan rakyat makin kasar. Orang yang mencuri milyaran rupiah tidak dihukum padahal seorang miskin yang mencuri satu ayam dipukul oleh masal sampai mati.

Sesudah reformasi, pemerintahan yang otoriter dikurangi dan banyak masalah yang sudah lama disembunyikan atau disimpan, meluap dan mengancam keseimbangan

masyarakat. Perasaan ketidakadilan dalam konteks lebih bebas dan demokratis membawa banyak orang menuntut hak-hak mereka. Gereja sendiri tergoda menjadi hanya salah satu dari sekian banyak kelompok yang berjuang untuk kekuasaan dan kepentingan sendiri. Pada masa transisi (masa edan), banyak orang kehilangan kesabaran dan cemas. Orang yang takut sangat berbahaya oleh karena tidak lagi berharap kepada masa depan.

Gereja tidak boleh terbawa oleh arus tetapi sebaliknya dipanggil untuk mewujudkan sikap pengharapan yang tenang di tengah ketidakpastian. Ciri-ciri khas civil society adalah toleransi, kesabaran dan kesetiaan terhadap proses hukum. Kebijakan yang demikian bisa tumbuh kuat dalam orang yang terbiasa berharap dalam Tuhan. Dalam “zaman edan” Gereja masih punya harapan dalam Kerajaan Allah yang menurut iman Kristen pasti akan datang. Sumbangan Gereja kepada civil society Indonesia dalam masa edan adalah pengharapan yang digambarkan dalam doa Yesus: “Datanglah KerajaanMu; jadilah kehendakMu, di bumi seperti di sorga.” Kerajaan Tuhan bukan Kerajaan Gereja tetapi merupakan kedaulatan Allah yang diakui oleh semua agama Abrahamik.

2. Ancaman dari Kekerasan: Membalas atau Tunduk?

Sudah lama gereja-gereja terancam dengan kekerasan dari kelompok ekstrimis Islam dan juga kelompok fanatik Kristen. Setiap tahun puluhan gedung gereja dibakar di Indonesia. Sejak reformasi ribuan warga Kristen dibunuh, kadang kadang dengan kolusi dari aparat. Ribuan warga Islam juga dibunuh, kadang kadang secara sangat sadis. Akan tetapi, ancaman kepada gereja sebagai civil society tidak datang dari kekerasan pada diri sendiri, tetapi dari godaan untuk menyerang, membalas atau tunduk. Kalau warga gereja menyerang warga agama lain, gereja sebagai institusi civil (beradab), apalagi sebagai saksi kepada kasih Tuhan sudah gagal. Gereja yang membalas atau menyerang dengan kekerasan tidak lagi Gereja Yesus Kristus, tetapi sudah menjadi hanya salah satu golongan primordial dalam masyarakat yang berjuang untuk kepentingan sendiri. Orang Kristen yang memakai kekerasan terhadap musuhnya tidak lagi murid Yesus apalagi saksi kepada injil (kabar baik). Kalimat-kalimat ini yang keras dan menghitam-putihkan situasi rumit ditulis dengan berat hati oleh karena dua hal.

Pertama, oleh karena saudara-saudara yang hidup di bawah ancaman serang merasa terpaksa membela diri dan kalau saya mengalami hal-hal yang mereka alami mungkin saya ikut berperang. Instink manusia yang paling dasar adalah mempertahankan hidup dan membela diri. Terlalu gampang orang yang hidup enak dan aman mengeritik saudara-saudara yang merasa tersiksa, tertekan dan terpojok. Kami di Jawa tidak tentu lebih beradab daripada saudara di Maluku atau Aceh. Hanya kami mengalami situasi politik yang berbeda.

Mungkin kelemahan Gereja di Jawa, oleh karena relatif kecil di tengah rakyat Muslim yang banyak, merupakan keuntungan. Gereja di pulau Jawa tidak berani membalas kalau gedung-gedungnya terbakar.

Alasan kedua, oleh karena dalam situasi keributan kekuasaan, kekerasan atau ancaman kekerasan menjadi satu alat yang sekaligus sangat efektif dan sangat berbahaya. Sangat efektif oleh karena “bargaining power” (kekuatan tawar-menawar), dalam situasi perubahan struktur kekuasaan menjadi jauh lebih kuat ketika kubu tertentu siap memakai kekerasan. Kekerasan bisa memaksa kehendakan atau menghentikan orang lain yang mau memaksa kehendakan. Tetapi kekerasan sangat berbahaya oleh karena kekerasan selalu mengundang kekerasan balik yang lebih dahsyat. Kekerasan melahirkan kekerasan melahirkan kekerasan dalam spiral kekerasan yang sulit dihentikan.¹³ Akhirnya tidak ada yang menang oleh karena semua hancur. Agama-agama yang menyerang atau membalas kekerasan dengan kekerasan bukan civil society. Ketika Gereja hanya memperjuangkan kepentingan dan kekuasaan sendiri Gereja tidak lagi umat murid Yesus.

Namun, gereja yang tunduk saja kepada kekerasan juga bukan civil society. Gereja yang tunduk kepada paksaan yang tidak adil kehilangan kebebasan institusional yang menjadi makna “civil society ke-dua”. Gereja yang tunduk oleh karena kekerasan atau ancaman, kehilangan “social space” (tempat atau peluang sosial), untuk mewujudkan makna diri sendiri tanpa paksaan.¹⁴ Tugas sosial gereja yang ditekankan oleh sebagian masyarakat yang tidak “civil,” adalah perlawanan tanpa kekerasan (nonviolent resistance). Perlawanan gereja-gereja tanpa kekerasan tidak mungkin tanpa pemimpin gereja yang kuat, berwibawa dan berani. Pendeta-pendeta atau pastor-pastor yang lari dari gereja kalau diancam kekerasan, kurang bertanggung jawab.

Civil society adalah sekaligus *tujuan* sosial masyarakat maupun *metode sosial* masyarakat. Agama-agama Abrahamic yang ingin masyarakat menjadi lebih beradab harus memakai cara atau metode hidup sosial yang civil atau beradab. Ada mithos dalam kalangan Islam maupun Kristen, bahwa kalau seorang mati dalam perang membela agama dia akan diampuni dosanya bahkan langsung ke surga. Saya punya mimpi: bagaimana kalau pemimpin-pemimpin dari Islam dan Kristen menandatangani pernyataan bersama bahwa *siapa pun*, Kristen atau Muslim, yang menyerang dan membunuh seseorang, hanya oleh karena dia beragama lain, siapa pun yang membakar, menjarah, memperkosa dan menganiyai orang lemah dalam nama agama, dialah yang akan langsung ke neraka oleh karena dia menciptakan neraka di dunia ini.

3. Ancaman dari Korupsi

Dalam bahasa Inggris ada istilah sinis: “Everyone has their price.” Maksudnya, setiap orang bisa dibeli. Hanya tinggal mencari tahu harganya. Harga seseorang tidak tentu uang. Bisa saja kedudukan, hormat, seks, keamanan, kekuasaan, kewibawan dan lain sebagainya. Tetapi uang dalam jumlah banyak atau sedikit merupakan harga paling biasa untuk membeli seorang manusia. Masalah “money politics” yang terus menerus berlangsung bersama dengan kasus-kasus KKN, menunjukkan bahwa korupsi adalah penyakit sangat besar yang menghambat civil society di Indonesia. Masyarakat yang civil sebaiknya jujur dan tulus (civil society #1). Institusi-institusi pertengahan di antara keluarga dan pemerintah (civil society #2), tidak lagi mandiri dan independen kalau di kendali oleh uang dari luar. Saya sendiri tidak percaya bahwa setiap orang manusia bisa dibeli, tetapi setiap orang bisa tergoda dan banyak yang jatuh.

Agama-agama Abrahamik sebagai civil society sangat terancam oleh korupsi. Sudah jelas bahwa ada kekuatan politik, ekonomi, agama dan militer tertentu yang tidak setuju dengan Indonesia sebagai civil society yang pluralistik. Mereka tidak mau kemajemukan agama-agama yang menjadi kuat sebagai institusi-institusi kritis. Cara paling gampang untuk menghancurkan agama-agama Abraham sebagai kekuatan civil society adalah korupsi.

Kita sudah terbiasa dengan budaya “patron-klien” di mana hadiah-hadiah dimaksudkan untuk membeli kesetiaan. Di satu pihak, yang lebih kuat harus diberi hadiah besar supaya mereka melindungi kliennya. Di pihak lain, yang lebih kuat mengalir dana atau fasilitas kepada kliennya supaya mereka tetap setia dan mendukung patronnya. Sistem patron klien berakar dalam budaya patriarkis Indonesia yang menjaga hierarki neo-feudal yang merupakan *status quo* struktur kekuasaan. Semua orang dalam struktur kekuasaan lama beriman Abrahamic, baik Muslim maupun Kristen. Struktur kekuasaan tersebut sangat terancam oleh reformasi yang menuntut transparansi, supremasi hukum, demokrasi, kesetaraan rakyat dan paling hebat, penghukuman terhadap KKN. Oleh karena itu, struktur kekuasaan lama berjuang mati-matian untuk melestarikan struktur kekuasaan tersebut. Satu-satunya alat paling efektif untuk menguatkan jaringan kekuasaan adalah uang. Siapa-siapa yang tidak bisa dipaksakan dengan kekerasan atau dimanipulasikan dengan bohong-bohong harus dibeli dengan uang.

Gereja-gereja di Indonesia masih jauh dari ideal civil society dalam hal-hal finansial. Gereja di Indonesia belum bersih, mandiri dan bebas dari godaan dana. Saya sangat shock dan sedih setiap kali saya mendengar cerita-cerita tentang korupsi dalam gereja. ‘Masa’ Gereja Yesus Kristus tidak bisa mengangkat pemimpin-pemimpin yang bersih dari

godaan uang! Kasihanilah Gereja di mana pemimpin justru membeli jabatannya dengan korupsi halus! Celakalah kalau Gereja menjadi hanya salah satu medan perang dalam struktur kekuasaan di mana orang “Kristen” bersaing keras untuk kedudukan demi kepentingan sempit. Kalau begitu kami sudah menjadi seperti “...orang-orang munafik, sebab cawan dan pinggan kamu bersihkan sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan.” (Matius 23:25)

Korupsi merupakan ancaman dari luar, tetapi bisa saja dilihat sebagai ancaman dari dalam Gereja sendiri. Tidak ada ancaman kalau tidak ada kelemahan dulu. Namun, dalam rangka civil society saya merasa masalah bukan semata-mata godaan duit yang bisa menarik hati setiap manusia yang berdosa. Masalah adalah kemandirian Gereja dari struktur kekuasaan yang mau mengendalikan Gereja sebagai alat kekuasaannya. Pejabat Gereja yang tergantung kepada pemerintah, konglomerat, TNI ataupun Gereja di luar negeri, untuk makanan sehari-hari, tidak bebas dan belum menjadi civil society # 2. Menurut pandangan Jürgen Habermas, wacana kritis dan ideal (“the ideal speech situation”), hanya berlaku kalau pembicara bebas dari paksaan politik/militer (senjata) dan paksaan ekonomi (uang).¹⁵ Memang civil society tidak sama dengan “ideal speech situation”. Tetapi agama-agama sebagai kekuatan civil society seharusnya relatif bebas dari manipulasi duit.

Yesus pernah bilang kepada calon murid-muridnya, anda hanya boleh ikut satu guru. Jadi silakan pilih apabila anda mau melayani duit atau saya. Tidak boleh keduanya. Maka siapapun yang memusatkan duit dan menerima suap tidak boleh lagi disebut “Kristen.” Dalam hal ini kami tidak membutuhkan retorika reformasi lagi, tetapi teladan-teladan yang bersih dan bebas dari godaan korupsi.

4. Ancaman dari Primordialisme

Primordialisme adalah sikap yang memuliakan dan menekankan identitas seseorang atau kelompok yang dianggap paling dasar, yaitu identitas paling pokok dan paling sejati. Primordialisme menjadi semacam fenomena hebat di seluruh dunia pada akhir abad 20 dan awal abad 21 yang mirip atau paralel dengan fenomenon nasionalisme pada abad 19-20. Primordialisme yang menjadi unsur dominan dalam banyak “Low Intensity Conflict” (LIC), yaitu konflik tingkat rendah yang kurang dari kehebatan perang antara negara. Paling sedikit ada tiga penyebab primordialisme. Pertama adalah delegitimasi ideologi nasionalisme dan kecurigaan terhadap pemerintahan pusat. Ideologi nasionalis semakin lemah ketika ancaman dari luar negeri (seperti penjajahan), makin jauh dan janji-janji kemerdekaan dan kesejahteraan dari negara makin diragukan. Kalau ideologi nasionalis tidak memberi identitas

kepada warga yang memuaskan, maka orang-orang mencari identitas lebih lokal berdasarkan ras, etnisitas dan agama.

Kedua, semakin globalisasi menguasai dunia dan mengurangi keberanekaragaman budaya, adat, nilai etis dan sebagainya, semakin manusia berontak dengan menekankan identitas lokal. Selain fakta bahwa sebagian besar penduduk dunia tidak mampu menikmati budaya kapitalis barat yang memerlukan banyak duit, masih ada banyak orang yang lebih senang warung tegal dibandingkan MacDonalDs. Primordialisme tidak hanya berontak terhadap nasionalisme, tetapi juga terhadap globalisasi. Manusia ingin memiliki identitas yang khas dan lokal, berbeda dari keseragaman budaya pasar global.

Ketiga, primordialisme berontak terhadap kompleksitas perubahan sosial yang terlalu cepat. Dalam era revolusi informasi, kita dibanjiri dengan ide-ide, teknologi-teknologi, metode-metode, nilai-nilai, gaya-gaya dan budaya-budaya yang sungguh-sungguh baru dan asing. Setiap orang terbatas dalam kemampuan mengerti apalagi menanggapi banjir informasi yang mentransformasikan dunia tanpa kendali. Kita bingung dengan “future shock” dan kenyataan yang terus berubah. Maka banyak orang di seluruh dunia mencoba “pulang ke desa”, yaitu kembali kepada akar identitas primordial. Agama menjadi satu unsur primordial yang sangat penting oleh karena agama menjanjikan kebenaran yang tidak berubah dan stabil abadi. Masyarakat berubah-ubah tetapi Tuhanlah yang sama kemarin, hari ini dan besok. Dengan kata lain, diharapkan identitas primordial agama menyediakan Kebenaran Ilahi yang memberi ketentraman dan keamanan dalam dunia yang menakutkan.

Primordialisme mengancam agama sebagai unsur “civil society” oleh sebab primordialisme sangat menguatkan solideritas “in-group”nya (kelompok dalam atau “kami”), dengan memisahkan “kami” dari “out-group”nya (kelompok luar atau “mereka”). Memang di dalam kelompok primordial tertentu nampaknya ada civil society yang hebat walaupun terbatas. Namun pengaruh agama terhadap civil society masyarakat Indonesia tidak mungkin melalui keasyikannya perseketuan primordial warga satu agama saja. Gereja hanya akan menguatkan civil society dalam masyarakat Indonesia kalau bisa berkomunikasi secara bebas, jujur, sopan dan rasional dengan seluruh lapisan masyarakat. Gereja primordial yang takut atau sombong terhadap “mereka” (orang luar), atau mau memisahkan diri dari agama, suku dan golongan lain, tidak lagi civil atau “civic” (memperhatikan kebaikan umum), malah memperparahkan pecahan masyarakat.

Primordialisme tidak hanya mengancam hubungan Gereja dengan agama atau kelompok lain, tetapi juga mengancam keesaan Gereja. Menurut pandangan saya gereja-gereja Indonesia sudah cukup terpisah satu sama lain berdasarkan bahasa, etnis dan suku.

Kalau ditambah dengan begitu banyak aliran teologi dan denominasi yang diimpor dari Barat, cukup sulit membayangkan keesaan Gereja. Dosa-dosa kuno dari Gereja Barat ditelan utuh oleh Gereja Indonesia dan ditambah dengan primordialisme.

Namun kenyataan Gereja yang terpecah berdasarkan suku, bahasa dan etnis juga bisa dilihat secara positif. Seperti banyak hal, primordialisme dalam gereja adalah mata uang yang punya dua sisi. Ikatan primordial menguatkan kesatuan dan persatuan dalam satu jemaat atau suku dan sekaligus memisahkan mereka dari kelompok yang lain. Primordialisme merupakan reaksi terhadap pemerintahan yang terlalu otoriter dan berusaha mengontrol semua dari pusat. Agama-agama primordial tidak mau seragam dengan Jakarta. Hal seperti itu wajar-wajar saja selama keberanekaragaman agama yang lahir dari kekayaan budaya suku-suku dan bangsa-bangsa Indonesia, diwujudkan dengan kesadaran tentang solidaritas nasional dan kemanusiaan beradab yang transnasional.

Saya menduga bahwa identitas primordial agama-agama, termasuk gereja-gereja, di Indonesia akan makin kuat daripada sebaliknya, khususnya dalam orang beragama yang merasa tertindas atau tertekan. Hal seperti itu terkait dengan otonomi daerah dan desentralisasi. Mungkin satu potensi sangat penting dalam agama Kristen adalah membangun gereja yang melebihi batas-batas primordial supaya identitas Kristen yang lebih terbuka bisa dihayati dalam konteks gereja. Demi tujuan tersebut, yang paling penting adalah kepemimpinan gereja yang tidak eksklusif tetapi terbentuk dari berbagai suku dan etnis. Gereja-gereja yang berasal dari satu suku tidak perlu bubar, tetapi Gereja Indonesia yang beraneka ragam masih dipanggil untuk membuktikan bahwa, “Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus.” (Galatia 3:38). Visi itu menjadi salah satu dasar untuk civil society di Indonesia.

5. Ancaman Perpecahan dan Disintegrasi

Masalah yang paling nampak di Indonesia pada masa reformasi adalah bagaimana hidup secara “Bhinneka Tunggal Ika.” Bagaimana mewujudkan “unity in diversity”. Bagaimana melestarikan keberanekaragaman suku-suku dan kelompok-kelompok di Indonesia tetapi sekaligus tetap bersatu? Masalah kesatuan dan persatuan di tengah keberaneka-ragaman bukan masalah baru atau masalah khas Indonesia. Ini masalah manusia yang sudah kuno. Namun, masalah ini menjadi sangat urgen pada masa reformasi. Disintegrasi tidak hanya mengancam Indonesia tetapi juga mengancam agama-agama Abrahamik Indonesia sebagai unsur penting dalam civil society.

Mengapa kesatuan bangsa negara Republik Indonesia terancam sesudah Presiden Soeharto lengser? Jawabannya sangat kompleks, tetapi empat penyebab cukup jelas:

1. Pemerintah-pemerintah sesudah Pak Harto sulit membuktikan kekuatan untuk menyatukan keberanekaragaman suku, bangsa dan agama yang ada di Indonesia. 2. Sudah lama sentralisasi terlalu kuat. Pada masa reformasi, desentralisasi dijalankan, dengan akibat setiap bagian negara ingin lepas dari kendala pusat; yang luar Jawa tidak mau lagi dikontrol oleh Jakarta. 3. Ketidakadilan dan penindasan dari penguasa kepada rakyat disimpan terlalu lama. Sebagian rakyat tidak mau bersatu lagi (khususnya di Aceh, Papua dan Maluku);¹⁶ 4. Makin kuatnya kelompok-kelompok beragama (baik Kristen maupun Islam), yang ingin berkuasa atas kelompok agama lain.

Kalau Indonesia sebagai civil society akan bertahan, harus ada visi moral, sosial dan metafisik yang membenarkan kesatuan dan persatuan Indonesia. Mengapa kita mau melestarikan bangsa-negara Indonesia? Mengapa tidak menerima saja kenyataan perbedaan primordial dan membentuk beberapa negara yang lebih bersifat primordial? Dulu visi untuk civil society di Indonesia cukup jelas dalam ideologi Pancasila. Tetapi Pancasila sudah dipakai terlalu lama sebagai topeng yang menyembunyikan kenyataan kerakusan elit. Wacana tentang civil society merupakan satu usaha baru untuk mencari visi yang bisa menyatukan masyarakat Indonesia. Menurut saya, wacana civil society, walaupun berharga, terlalu tipis untuk menyatukan bangsa negara Indonesia. Sampai sekarang ini belum ada konsensus tentang makna civil society.

Saya yakin bahwa setiap agama bisa, secara nyata, mempengaruhi kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia. Gereja merupakan satu institusi yang ada di seluruh Indonesia dan kalau Gereja yang esa memperlihatkan keesaannya (dan bukan sebaliknya perpecahannya), itu akan mempengaruhi kesatuan bangsa. Sebaliknya kalau Gereja dibawa oleh arus disintegrasi, Gereja akan melemahkan Indonesia sebagai satu civil society. Gereja-gereja di Indonesia tidak harus disatukan sebagai lembaga (yang hanya berarti sentralisasi). Bukan organisasi formal atau kesamaan doktrin atau pemimpin manusia yang menyatukan kita, tetapi bahwa kita semua setia kepada satu Raja, Yesus Kristus.

Dalam hal ini, sangat disesalkan bahwa pemerintah Indonesia telah mendefinisikan Katolik sebagai bukan Kristen dan Kristen sebagai bukan Katolik. Siapa bilang Katolik bukan Kristen? Apakah Gereja Katolik tidak mengakui Kristus sebagai pusat iman dan kepala Gereja? Siapa bilang Kristen bukan katolik? Katolik berarti “am” dan setiap minggu warga Kristen menyaksikan bahwa kami percaya dalam “Gereja yang kudus dan am.” Keesaan Gereja berarti Gereja yang katolik. Gereja yang katolik berarti Gereja

yang universal, Gereja yang sedunia. Perbedaan doktrin di antara Katolik dan Protestan sering kali lebih kecil daripada perbedaan doktrin di antara pendeta-pendeta yang sama-sama Protestan. Saya bermimpi tentang saat di mana semua warga Gereja Yesus Kristus menulis “Kristen-Katolik” dalam KTP mereka.

VII. Penutup

Civil society merupakan “tempat” simbolis di mana semua orang, tanpa paksaan bisa berkomunikasi secara bebas dan sopan. Di “sana” mereka bisa mencari tahu secara jujur, perbedaan dan kesamaan mereka. Sudah cukup jelas bahwa eksklusifisme dan fanatikisme bisa menghancurkan civil society. Paling sedikit anggota civil society harus menghormati pandangan-pandangan serta iman-iman yang berbeda. Menghormati tidak berarti setuju. Civil society adalah konsep “tipis” yang tidak mungkin bertahan sendiri tanpa dukungan dari visi-visi sosial dan moral yang lebih “tebal”. Agama Abrahamic di Indonesia bisa mendukung civil society melalui tiga cara. Pertama, kita bisa kerjasama dengan saudara-saudara yang beragama lain untuk “mempertebalkan” konsep civil society yang lintas budaya dan lintas agama walaupun masih boleh disebut khas Indonesia. Kedua, kita bisa menjelaskan visi sosial yang berakar dalam agama masing-masing. Satu visi yang mendukung civil society tidak harus disetujui oleh semua. Setiap agama punya kekayaan teologis sendiri yang bisa menguatkan civil society bagi umat agama tersebut. Ketiga, Indonesia sebaiknya menghidupkan kembali visi mulia yang pernah menyatukan masyarakat Indonesia, yaitu Pancasila. Pancasila tidak bertentangan dengan civil society. Tetapi tanpa civil society, sulit sekali dibayangkan bagaimana masyarakat Indonesia bisa mencapai visi Pancasila.

¹ Walaupun *civil society* adalah istilah bahasa Inggris yang seharusnya memakai huruf miring atau tanda kutip, dalam makalah ini saya memakai huruf biasa tanpa tanda kutip. Istilahnya dipakai terus dalam makalah ini dan terlalu banyak huruf miring mungkin mengganggu pembaca atau memberi terlalu banyak tekanan kepada civil society yang tidak dimaksudkan oleh penulis.

² Lihat misalnya, Salvador Giner, "Civil Society and its Future" dalam Civil Society: Theory, History, Comparison, John A. Hall, ed., (New York: Polity, 1994?). Giner mengatakan bahwa dasar civil society adalah individualism, privacy, free market, pluralism and toleration of class difference.

³ Nurcholish Madjid, “Dinamika Budaya Pesisir dan Pedalaman: Menumbuhkan Masyarakat Madani,” dalam Abdullah Hafidz, et. Al. (eds.), HMI dan KAHMI: Menyongsong Perubahan, Menghadapi Pergantian Zaman (Jakarta: Majelis Nasional KAHMI, 1997), h. 294f. Lihat Ahmad Baso, “Civil Society sebagai Kritik: Perdebatan Masyarakat Sipil dalam Islam Indonesia,” makalah untuk Seminar Nasional Pra Muktamar NU dan Pembentukan Masyarakat Mutamaddin (Sipil), Yogyakarta, 4-5 September, 1999.

⁴ Dari pandangan ini, boleh dipersoalkan apakah Amerika Serikat bisa disebut civil society atau tidak (kurang). Tingkat kejahatan yang memakai kekerasan terlalu tinggi dan mewujudkan masyarakat yang kurang civil.

⁵ M. Dawam Rahardjo tidak setuju dengan penafsiran ini yang menurutnya berdasarkan kesalahpahaman, yaitu bahwa kata lawan civil adalah militer, pada hal kata lawan civil seharusnya *state* atau negara, bukan militer. Tetapi menurut saya civil society punya beberapa referensi, bukan satu saja. Lihat, M. Dawam Rahardjo, "Masyarakat Madani di Indonesia," Paramadina: Jurnal Pemikiran Islam 1/2, 1999, h. 7.

⁶ Memang situasi-situasi tertentu di Indonesia sangat rumit dan mungkin hanya militer mampu menghadapinya. Terlalu gampang kalau mengatakan seharusnya polisi saja menyelesaikan masalah di Aceh, misalnya. Tetapi saya masih yakin bahwa "security approach" yang terlalu banyak percaya kepada kekerasan militer tidak bisa menyelesaikan masalah-masalah Indonesia tetapi justru memperparahkan masalah tersebut.

⁷ Robert W. Hefner, "On the History and Cross-Cultural Possibility of a Democratic Ideal" dalam Democratic Civility, Robert W. Hefner, ed. (New Brunswick: Transaction, 1998), h. 7.

⁸ Diucapkan oleh Nurcholis Madjid beberapa tahun yang lalu dalam seminar di Bina Dharma, Salatiga. Walaupun saya menghormati pandangan ini, saya merasa kalau kita mau membuktikan pendapat tersebut, kita harus bertanya kepada minoritas-minoritas yang non-Islam dalam negara-negara seperti Saudi Arabia, Iran dan Irak, daripada percaya kepada ideologi pemimpin negara yang beragama Islam.

⁹ Dworkin, "Liberalism" dalam Public and Private Morality, edited oleh Stuart Hampshire (Cambridge: Cambridge University Press, 1978). Lihat Charles Taylor, "The Politics of Recognition" dalam Multiculturalism, edited oleh Amy Gutmann (Princeton: Princeton University Press, 1994), h. 56.

¹⁰ Dalam pikiran Kant, prinsip "universalizability" mempengaruhi pandangan bahwa setiap orang harus dihormati secara mutlak. Lihat John Rawls, A Theory of Justice (Cambridge: Harvard University Press, 1971).

¹¹ Charles Taylor dalam Multiculturalism, Op. Cit.

¹² Lihat dissertasi Suwondo tentang demokrasi yang berlaku di tengah petani-petani Jatinom.

¹³ Lihat Dom Helder Camera, Spiral of Violence. Kekerasan pertama adalah ketidakadilan yang mengundang reaksi protes dari rakyat (kekerasan kedua). Terus ada represi, kemudian resistensi dan seterusnya.

¹⁴ Sebagai alat represi, ancaman lebih efektif daripada kekerasan. Kekerasan sering membangun resistens padahal ancaman menakutkan dan meredam resistens. Pada masa orba sering kali kehendak pemerintah dipaksakan dengan "senjata" memakai telepon saja dari ABRI. Namun ancaman tidak efektif kalau kemungkinan memakai kekerasan tidak nyata.

¹⁵ Lihat, Jurgen Habermas, Communication and the Evolution of Society (Boston: Beacon, 1979). Bdk. Jurgen Habermas, Ilmu dan Teknologi sebagai Ideologi, Franz Magnis-Suseno, pengantar (Jakarta: LP3ES, 1990).

¹⁶ Sekarang (2009), gerakan separatis di Aceh dan Maluku tidak aktif lagi.